



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta belum diaturnya kelembagaan pelayanan teknologi tepat guna di tingkat kecamatan dan di desa/kelurahan, maka untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai administrasi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya.
7. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
12. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG, adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
13. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
17. Warung Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut Wartek adalah Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
18. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

20. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah:

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. meningkatkan usaha ekonomi;
- d. mengembangkan kewirausahaan;
- e. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. memberdayakan masyarakat setempat;
- h. memberikan manfaat secara berkelanjutan;
- i. sederhana.

Bagian Ketiga
Arah dan Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan Daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. sosial kemasyarakatan;
- d. teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, pengembangan teknologi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemsayarakatan TTG; dan
- f. penerapan TTG.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. jenis TTG;
 - c. jenis usaha
 - d. sosial budaya; dan
 - e. potensi sumber daya daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang ilmu dan pengetahuan.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau Daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi TTG.
- (2) Hasil Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan dalam penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Instansi Teknis melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) melalui pengupayakan untuk mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Instansi Teknis memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui lomba TTG di tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional

Bagian Kelima Pemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
 - a. pagelaran/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.
- (3) Pelaksanaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Bagian Keenam Penerapan

Pasal 13

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam menerapkan dan memanfaatkan TTG secara optimal, melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pendampingan.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang dan/atau barang yang dilakukan melalui:
 - a. hibah;
 - b. bantuan sosial; atau
 - b. dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek dan Wartek.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan teknis dan pelatihan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Teknis terkait.

BAB III

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat, dibentuk lembaga pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. Wartek yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Wartek di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 16

- (1) Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok:
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
 - b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - f. memfasilitasi penerapan TTG;
 - g. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) Wartek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok:
 - a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
 - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat dan usaha kecil;
 - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
 - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Wartek kepada Posyantek.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek dipilih berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Susunan pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi kemitraan;
 - e. seksi pengembangan TTG; dan
 - f. seksi pelayanan TTG dan Usaha.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek dan Wartek di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Wartek di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (6) Bagan kepengurusan Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 22

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan;
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang berprestasi menciptakan inovasi TTG dapat diberikan penghargaan dari Bupati berdasarkan usul Instansi Teknis.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang dan/atau barang; atau
 - c. beasiswa bagi pelajar.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis
 - c. supervisi dan konsultasi; atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di tingkat Desa.
- (2) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 26

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah/ Instansi terkait secara efisien, efektif dan rasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Teknis terkait pada lingkup Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 27

Koordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 28

- (1) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, ditujukan kepada:
 - a. aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaku usaha/industri kecil dan menengah.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Teknis terkait.
- (4) Dalam melaksanakan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Teknis terkait dapat bekerjasama perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

Bagian Keempat Supervisi dan Konsultasi

Pasal 29

- (1) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan; dan
 - b. pengelolaan TTG oleh masyarakat.
- (2) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Dalam melaksanakan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swasta dan lembaga lain yang terkait.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis; dan
 - c. pengelolaan TTG oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 31

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaporkan oleh Instansi Teknis terkait kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 28 Seri E Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **30 MEI 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **30 MEI 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

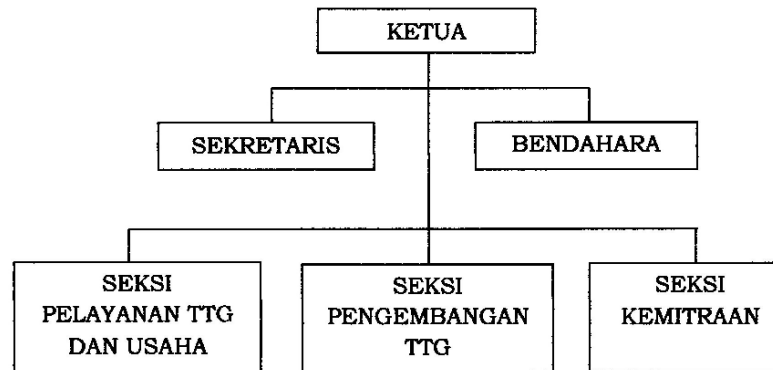
SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 39 SERIE NOMOR 32**

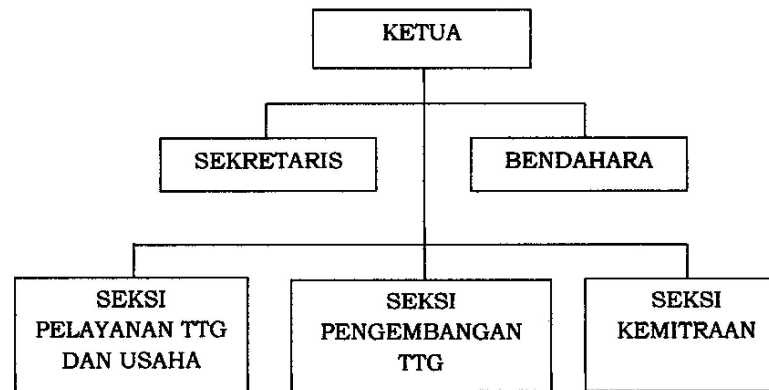
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BAGAN KEPENGURUSAN POSYANTEK DAN WARTEK

A. BAGAN KEPENGURUSAN POSYANTEK



B. BAGAN KEPENGURUSAN WARTEK



BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN